



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke	: 6
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Menteri Agama RI dan Kepala Badan BPKH
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 30 Mei 2022.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: Penyusunan Program 2022
Ketua Rapat	: H.Yandri Susanto, S.Pt
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 45 dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 6 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Menteri Agama RI Beserta Jajaran. 4. Kepala Badan Pelaksana BPKH Beserta Jajaran.

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.45 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua Hj.Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si., Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA. dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## I. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI dan Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan agenda membahas “**Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Alokasi Kuota Pengawas Eksternal Tahun 1443 H/2022 M**”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut bersama Menteri Agama RI dan BPKH atas usulan tambahan anggaran operasional haji reguler dan khusus pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M. Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama RI untuk menyampaikan surat atau keterangan resmi dari pemerintah Arab Saudi yang terkait dengan tambahan anggaran masyair dan dokumen pendukung lain sebagai bahan pembahasan selanjutnya.
2. Dalam rangka mengoptimalkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M, Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama RI dan/atau Kepala Badan Pelaksana BPKH untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, di antaranya:
  - a. Merumuskan alternatif sumber pembiayaan operasional haji khusus yang lebih berkeadilan.
  - b. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait biaya haji dan dampaknya terhadap sustainabilitas keuangan haji.

## II. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.30 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
KETUA,**



**H.YANDRI SUSANTO, Spt.**